BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Pembalakan Liar
Edisi : 23 April 2008
Halaman : A1

Pemeriksaan Petinggi Riau Terganjal Istana

"Kelihatannya pemerintah takut."

JAKARTA --- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kemarin tak kunjung mengeluarkan izin pemeriksaan atas empat bupati di Riau dalam kasus pembalakan liar yang diduga melibatkan dua pabrik bubur kertas raksasa di wilayah itu. Permohonan pemeriksaan itu sudah diajukan Markas Besar Kepolisian RI sejak 27 September 2007 silam.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengakui belum memproses surat izin itu.

"Memang belum selesai," kata Sudi di sela kegiatannya mendampingi Presiden Yudhoyono menerima Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Ketika didesak apa alasannya, ia menolak menjelaskan. "Kalau belum selesai, ya, belum selesai."

Empat bupati yang dibutuhkan keterangannya adalah Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman, Bupati Rokan Hilir H. Anas Makmun, Bupati Kampar Burhanuddin Husein, dan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar. Burhanuddin, yang dihubungi Tempo, tak banyak memberikan komentar. "Sampai saat ini belum ada pemeriksaan polisi," katanya. Begitu pula Raja Thamsir Rachman. "Soal itu, Bapak menyebut tidak tahu," kata Agus, ajudan Bupati Raja Thamsir. Sedangkan Anas Makmun tak merespons telepon wartawan Tempo.

Keterangan para bupati itu dibutuhkan dalam kapasitas mereka sebagai pemberi izin. Untuk keperluan yang sama pula penyidik memerlukan keterangan Gubernur Riau Rusli Zainal. "Bapak Gubernur berangkat ke Singapura. Kapan pulangnya, tidak terjadwal," kata Afrizal, anggota staf Gubernur Riau.

Polda sudah menyurati Markas Besar Polri agar memohon kepada Presiden mengeluarkan izin meminta keterangan Gubernur. Permohonan ini dikirim Polda ke Badan Reserse Kriminal Polri sejak Juli 2007. Namun, hingga kemarin Mabes Polri belum memproses lebih lanjut. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri membantah tudingan mengabaikan surat itu. Dia menegaskan pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan bupati. "Jika mereka terbukti terlibat, polisi baru memeriksa gubernur."

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Juru bicara Polda Riau, Ajun Komisaris Besar Zulkifli, menyatakan polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap para petinggi Riau itu. "Masih menunggu koordinasi," katanya.

Proses yang berbelit ini memancing sorotan tajam Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau Johny S. Mundung. "Kelihatannya memang benar pemerintah takut dengan dua pabrik kertas di Riau," katanya.

Kemarin puluhan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Serikat Gerakan Rakyat berunjuk rasa di depan markas Polda Riau. Mereka menilai Polda Riau tak punya nyali memeriksa empat bupati dan Gubernur Riau.

"Pelaku illegal logging sesungguhnya adalah teroris," kata Hariadi Usman, salah seorang pengunjuk rasa.

Kepala Satuan Pengendalian Massa Polda Riau Komisaris Polisi Sukman, yang menerima mereka, menegaskan polisi tetap melancarkan perang terhadap illegal logging. "Siapa tersangkut pasti disikat," katanya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup